

### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno, 2007, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Penerbit CV. Diadit Media Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, 2009, Penerbit Diadit Media, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Pergeseran Hukum Pidana*, 2011, Penerbit CV. Diadit Media Press, Jakarta.
- Amaritasari, Indah, 2014, *Corruption: An Extraordinary Crime*, The Jakarta Post, 23 Februari.
- Antaraneews, 2014, 15 Agustus.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Masalah Kodifikasi, Unifikasi Dan Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam RUU KUHP*, Focus Group Discussion terhadap RUU KUHP, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 25 Juni 2005.
- Atmasasmita, Romli, Dilema Pembuktian Terbalik, *KOMPAS*, 4 Februari 2011.
- \_\_\_\_\_, *Perampasan Aset Melalui Pembuktian Terbalik : Studi Perbandingan Hukum Pidana*, Makalah pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Hotel Borobudur, Jakarta, 10 Maret 2011.
- Beirne, Piers & Messerschmidt, James, 1995, *Criminology*, Second Edition, Harcourt Brage College Publishers.
- Berita Associated Press, Washington, 2014, 17 Desember.
- Europol, 2009, *White Paper on Best Practice in Asset Recovery*, Kementerian Dalam Negeri Spanyol.
- Gijssels, Jan, 1982, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschappen, Atwerpen.
- Girsang, Juniver, 2010, Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006, Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Greenberg, Theodore S., 2009, *Stolen Asset Recovery*. World Bank, Washington, DC.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Holland v. United States, 348 U.S. 121, 75 S. Ct. 127, 99 L. Ed. 150 [1954].



Hiariej, Eddy O.S., 2006, *Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi*, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM Volume 18. Nomor 3, Oktober.

\_\_\_\_\_, 2011, "Kontroversi Moratorium Remisi", *KOMPAS*, 12 November 2011.

\_\_\_\_\_, 2012, "Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Senin 30 Januari 2012.

Isra, Saldi, Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, dimuat dalam Buku *Korupsi Mengorupsi Indonesia. Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Editor Wijayanto dan Ridwan Zagrie, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Lafave, Wayne R., 2010, *Principles Of Criminal Law*, Second Edition, WEST A Thomson Reuters Business.

Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maya, Aulga, Suhariningsih, M.P., Hamidah, Siti, *Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris Oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Muhamad, Bushar, 1991, *Pokok Pokok Hukum Adat*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Pohan, Agustinus, Sunaryadi, Amien, dkk., 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan.

Prodjodikoro, R. Wirjono, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Ramelan, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana*”, BPHN, Jakarta.

Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/188, Desember 2000.

Sahetapy, J.E., 2003, *Asas Retroaktif : Suatu Kajian Ulang*, *KHN Newsletter*, Edisi Mei 2003.

Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

Schaffmeister, D., Keijzer, N., Sutorius, E.P.H., 1995, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Sahetapy, Liberty.



Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudiyat, Iman, 1983, *Peta Hukum Waris Indonesia*, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional.

Universitas Gadjah Mada, Program Pascasarjana, 2008, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis*, Yogyakarta.

Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I'*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1960. *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2000, *Hukum Pidana I*, Penerbit Pustaka Tirta Mas, Surabaya.

Walker, Angela, 2012, *The Hidden Flaw in Kobel under Alien Tort Statute the mens rea standard of corporate aiding and abetting is knowledge*, Borth western Journal of International Human Rights, Volume 10, Issue 3<<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1127&context=njhr>>

Wijayanto & Zachrie, Ridwan, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan Korupsi*, Kompas, Gramedia,

## **Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention  
Against Corruption, 2003*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Civil  
and Political Rights

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan *Asset*

Universal Declaration of Human Rights

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan  
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Agung RI No. 562 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 706 K/Pdt/2011, tanggal 14 Desember 2011.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336/KMK.01/2000 Tentang Paksa  
Badan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 339/Pid.B/2010/Jkt Pst, tanggal 16 Desember  
2010.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 134/Pdt.G/2010/PN Jkt.Ut, tanggal 17 Januari  
2011.

## Situs

*(dibuka dan diperbaharui sejak sekitar Februari 2013 sampai dengan April 2016)*

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/14/095352926/Ambil.Alih.Terlalu.Rumit.Menko.Perekonomian.Cenderung.Pailitkan.Tuban.Petro>

<http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2011/05/Modul-Hukum-Waris-4-Hukum-Dan-Sistem-Pewarisan-Adat.pdf>

<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Circumstantial+Evidence>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Circumstantial\\_evidence](http://en.wikipedia.org/wiki/Circumstantial_evidence)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption>

[http://wikipedia.org/wiki/Asset\\_recovery](http://wikipedia.org/wiki/Asset_recovery)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Debtors%27\\_prison#Council\\_of\\_Europe](http://en.wikipedia.org/wiki/Debtors%27_prison#Council_of_Europe)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Legal\\_burden\\_of\\_proof#Standard\\_of\\_proof:\\_United\\_Kingdom\\_trials](http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_burden_of_proof#Standard_of_proof:_United_Kingdom_trials)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Legal\\_burden\\_of\\_proof#Standard\\_of\\_proof:\\_United\\_Kingdom\\_trials](http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_burden_of_proof#Standard_of_proof:_United_Kingdom_trials)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Legal\\_burden\\_of\\_proof#Standard\\_of\\_proof:\\_United\\_Kingdom\\_trials](http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_burden_of_proof#Standard_of_proof:_United_Kingdom_trials)

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm#bab3>

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor>

<http://.practicallaw.com/2-500-6576?service=ld>

<http://professionaladvocate.blogspot.com/2013/11/penggabungan-gugatan-wanprestasi-dan.html>

<http://tesishukum.com/pengertian-subjek-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d333c7c129d/giliran-penunggak-pajak-di-palembang-disandera-ditjen-pajak>

[http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=240:korupsi-di-indonesia&catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621](http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240:korupsi-di-indonesia&catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621)

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/forfeiture>

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/circumstantial%20evidence>



**PELAKSANAAN ASSET RECOVERY DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM  
PERDATA INDONESIA**

HOTMA P.D. SITOMPOEL , Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. ; Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>  
[http://www.oireachtas.ie/parliament/media/housesoftheoireachtas/libraryresearch/spotlights/  
Debt\\_Part\\_3-\\_the\\_imprisonment\\_of\\_civil\\_debtors.pdf](http://www.oireachtas.ie/parliament/media/housesoftheoireachtas/libraryresearch/spotlights/Debt_Part_3-_the_imprisonment_of_civil_debtors.pdf)

[http://www.tempo.co/read/news/2015/03/17/063650533/Ini-Penjelasan-Menteri-Yasonna-  
Soal-Obral-Remisi](http://www.tempo.co/read/news/2015/03/17/063650533/Ini-Penjelasan-Menteri-Yasonna-Soal-Obral-Remisi)

<http://www.wetboekonline.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%206/162.html>

<http://ypdcrime.com/penal.law/article1.htm>